



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 294 TAHUN 2024**

**TENTANG  
IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6 DI SELURUH  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik telah diperbarui berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
  - b. bahwa telah ditetapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pelaksana *piloting* berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan *Piloting* Pada Katalog Elektronik;
  - c. bahwa mengingat kesiapan sistem dan infrastruktur Katalog Elektronik Versi 6 dan percepatan peralihan seluruh produk dan transaksi pada Katalog Elektronik Versi 6 maka diperlukan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 ke seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6 DI SELURUH KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Menetapkan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat mengimplementasikan Katalog Elektronik Versi 6.

KEDUA : Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KETIGA : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan proses bisnis pada Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

KEEMPAT : Layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik pada Katalog Elektronik dikenakan tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada penyedia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Katalog Elektronik yang dimaksud pada Keputusan ini adalah Katalog Elektronik sebagaimana tersedia pada laman <https://katalog.inaproc.id/>.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala LKPP Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan *Piloting* Pada Katalog Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh